

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan analisis peneliti dilakukan berdasarkan penelitian narasi sejarah Aceh pada buku teks sejarah Indonesia pada masa Orde Baru hingga Reformasi. Pada bab ini peneliti juga mengajukan beberapa poin penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Simpulan

Perbedaan narasi sejarah Aceh pada Kurikulum 1994, Kurikulum KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 menunjukkan perubahan yang signifikan dari bagaimana cara narasi sejarah Aceh diceritakan di buku teks pelajaran sejarah Indonesia. Perubahan yang terjadi ini mencerminkan dinamika politik dan sosial di Indonesia serta dampak dari demokratisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang terkait dengan narasi sejarah Aceh tersebut, antara lain:

- 1) Narasi sejarah Aceh dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia pada Kurikulum 1994 mencerminkan kontrol naratif dan selektif yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Dimana narasi sejarah Aceh dalam buku teks Kurikulum 1994 lebih menekankan pencapaian pembangunan di Aceh selama masa Orde Baru, seperti pembangunan Waduk Krueng Jreu sebagai bagian dari Pelita I (1969-1974) dan proyek-proyek reboisasi serta pembangunan pemancar stasiun TV. Fokus utamanya adalah pada pencapaian pemerintah pusat dalam membawa pembangunan ekonomi ke Aceh. Konflik bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dimulai pada tahun 1976, diabaikan dan tidak dibahas dalam narasi sejarah. Pemerintah lebih memilih untuk menutupi konflik separatisme yang dianggap mengancam stabilitas negara. Pemberontakan DI/TII di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Beureueh, juga tidak mendapatkan perhatian yang mendalam. Jika disebutkan, pembahasannya pun sangat singkat dan tidak membahas akar penyebab atau konteks politik lokal. Narasi sejarah di Kurikulum 1994 juga bersifat sentralistik, dengan penekanan pada kesatuan nasional. Sejarah Aceh

digambarkan dalam konteks sebagai bagian dari narasi besar perjuangan dan pembangunan nasional, dengan sedikit ruang untuk perspektif lokal atau perlawanan terhadap pemerintah pusat. Identitas politik dan budaya lokal di Aceh cenderung dipinggirkan. Narasi sejarah Aceh lebih difokuskan pada bagaimana Aceh berkontribusi pada kesatuan dan stabilitas Indonesia. Buku teks seringkali menonjolkan peran negara sebagai agen tunggal pembangunan dan pengelola wilayah. Peran masyarakat lokal atau ulama dalam dinamika politik Aceh cenderung diabaikan, sehingga narasi tersebut memperkuat citra negara sebagai pendorong utama kemajuan di Aceh. Narasi sejarah dalam Kurikulum 1994 juga menyederhanakan sejarah Aceh dengan menghilangkan kompleksitas konflik politik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa Aceh adalah bagian integral dari perjalanan pembangunan nasional tanpa menghadapi perlawanan berarti. Sejarah Aceh yang kaya dengan dinamika politik dan sosial lokal, termasuk peran penting ulama dan kelompok-kelompok seperti Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), kurang tereksplorasi. Narasi sejarah Aceh lebih berpusat pada kejadian-kejadian yang berhubungan langsung dengan program-program pembangunan pemerintah pusat.

- 2) Narasi sejarah Aceh dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum KTSP 2006 mulai menunjukkan perubahan dibandingkan dengan Kurikulum 1994. Narasi sejarah Aceh dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia pada Kurikulum 2006 lebih inklusif dan kritis dibandingkan Kurikulum 1994. Hal itu mencerminkan dampak dari demokratisasi pasca Reformasi. Buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum KTSP 2006 mulai memasukkan pembahasan tentang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik yang dimulai pada tahun 1976 ini tidak lagi diabaikan, tetapi dibahas sebagai bagian dari sejarah nasional. Perjanjian Helsinki 2005, yang mengakhiri konflik GAM, juga menjadi bagian dari narasi sejarah Aceh dalam buku teks Kurikulum KTSP 2006. Ini menandai adanya pendekatan baru yang lebih inklusif terhadap penulisan narasi sejarah Aceh, mengakui konflik bersenjata dan upaya penyelesaian damai sebagai bagian dari perjalanan sejarah Aceh. Selain itu, pembahasan soal GAM juga menandakan tentang pentingnya proses

perdamaian, stabilitas politik dan pentingnya mengangkat persoalan integrasi bangsa dalam narasi sejarah nasional pasca-Reformasi. Peran penting ulama seperti Daud Beureueh dalam pemberontakan DI/TII juga dibahas. Buku teks tampaknya telah memberikan lebih banyak ruang untuk membahas motif politik dan agama di balik pemberontakan tersebut, serta bagaimana ulama dan tokoh-tokoh lokal memainkan peran dalam dinamika politik yang terjadi di Aceh. Buku teks juga mulai terbuka untuk menyoroti latar belakang konflik di Aceh, termasuk ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan sentralisasi pemerintah. Narasi ini mencerminkan keterbukaan terhadap keberagaman perspektif sejarah, meskipun konflik masih dibahas dengan hati-hati dan cenderung lebih difokuskan pada resolusi daripada penguraian masalah yang mendalam. Buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum KTSP 2006 juga menunjukkan kecenderungan yang lebih kritis dalam menganalisis penyebab konflik di Aceh. Hal ini menandai adanya pergeseran dari narasi sejarah yang hanya menekankan kesatuan nasional menuju pendekatan yang lebih kritis terhadap isu-isu yang menyebabkan perpecahan. Terakhir, buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum KTSP 2006 juga mulai lebih banyak mengakui kontribusi Aceh terhadap sejarah nasional Indonesia, terutama dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Sejarah Aceh tidak lagi dipinggirkan tetapi dianggap sebagai bagian integral dari sejarah panjang perjalanan bangsa.

- 3) Narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum 2013 memperlihatkan pendekatan yang lebih holistik, berimbang, kritis dan inklusif dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) misalnya, dibahas secara lebih komprehensif. Buku teks dalam Kurikulum 2013, memberikan ruang lebih besar untuk menjelaskan latar belakang sosial, ekonomi, dan politik yang memicu lahirnya GAM. Narasi ini juga mencakup dampak konflik terhadap masyarakat Aceh (termasuk persoalan pelanggaran HAM) serta peran perjanjian Helsinki 2005 dalam mengakhiri konflik. Pembangunan kembali Aceh setelah konflik, termasuk peran masyarakat sipil dan bantuan internasional dalam membangun kembali infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah

bencana alam dan perang juga dibahas. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan narasi konflik dan resolusi damai sebagai bagian dari pembelajaran sejarah. Dalam kasus lain, buku teks juga mulai memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang peran ulama di Aceh, terutama terkait dengan gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Daud Beureueh. Ulama dan kelompok-kelompok lokal lainnya diakui sebagai aktor penting dalam sejarah politik Aceh. Buku teks juga membahas bagaimana pengaruh ulama melalui organisasi seperti Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) berperan dalam menciptakan dinamika politik di Aceh. Terakhir, buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum 2013 juga memberikan lebih banyak ruang bagi perspektif lokal dalam memahami sejarah Aceh. Buku teks mulai lebih banyak membicarakan dan mengaitkan sejarah lokal Aceh dengan sejarah nasional secara lebih terintegrasi. Peran Aceh dalam konteks sejarah Indonesia tidak hanya dilihat dari sudut konflik, tetapi juga dari kontribusi Aceh terhadap perjuangan kemerdekaan dan dinamika politik nasional dari masa ke masa.

- 4) Berdasarkan pemetaan dan perbandingan yang telah dilakukan, konstruksi narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia Kurikulum 1994, Kurikulum KTSP 2006, dan Kurikulum 2013 atau konstruksi narasi sejarah Aceh pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan cara melihat bagaimana narasi sejarah Aceh diceritakan pada buku teks pelajaran sejarah Indonesia. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik dan sosial di Indonesia serta dampak dari demokratisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi. Secara keseluruhan, bentuk narasi sejarah Aceh dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia mengalami pergeseran dari penekanan pada stabilitas dan pembangunan nasional di bawah Orde Baru (Kurikulum 1994), menuju narasi yang lebih kritis dan inklusif terhadap dinamika lokal dan konflik setelah era Reformasi (KTSP 2006 dan Kurikulum 2013). Kurikulum 2013, khususnya, mencerminkan kesadaran yang lebih besar terhadap HAM, pluralisme, dan pentingnya otonomi serta rekonsiliasi dalam sejarah Aceh.
- 5) Berdasarkan analisis yang dilakukan, narasi yang terkandung di dalam buku teks sejarah Indonesia juga diketahui tidak bebas nilai. Terdapat nilai-nilai

ideologis tertentu yang dicoba untuk ditanamkan kepada peserta didik yang tujuannya adalah untuk penguatan nilai-nilai identitas kebangsaan. Nilai-nilai ideologis yang dimaksudkan dan berhasil teridentifikasi adalah patriotisme, nasionalisme, integrasi bangsa, toleransi dan keterbukaan, kemanusiaan dan kepedulian sosial.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa implikasi dan rekomendasi terhadap penulisan buku teks pembelajaran sejarah Indonesia untuk SMA terutama yang berkaitan dengan narasi sejarah Aceh pada khususnya dan narasi sejarah Indonesia pada umumnya. Adapun implikasi dan rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pada setiap periodisasi sejarah Indonesia, narasi sejarah Aceh yang dituliskan ternyata tidak terdistribusi secara proporsional. Selain diakibatkan karena referensi-referensi akademik yang masih terbatas. Namun, kurangnya pemahaman penulis buku teks tentang sejarah Aceh juga mengakibatkan beberapa peristiwa sejarah Aceh yang harusnya bisa ditulis menjadi terlewatkan. Untuk itu kedepan, sebelum buku teks diluncurkan oleh pemerintah pusat, ada baiknya dilakukan uji publik terlebih dahulu dengan melibatkan pemerintah daerah, guru, sejarawan nasional maupun lokal, ahli pendidikan dan juga akademisi-akademisi lain yang kompeten di bidangnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa teks yang dihasilkan tersebut telah memenuhi pedoman yang ditetapkan serta layak untuk dikonsumsi (digunakan oleh peserta didik).
- 2) Materi narasi sejarah Aceh yang disajikan dalam buku teks pelajaran sejarah Indonesia sebaiknya tidak hanya menyampaikan fakta-fakta, tetapi juga perlu menyertakan interpretasi nilai yang dapat dijadikan pelajaran bagi peserta didik. Pemaknaan nilai yang diberikan juga sebaiknya tetap berlandaskan pada konteks peristiwa serta tujuan dari pembelajaran sejarah tersebut, sehingga materi tersebut dapat bermakna dalam mendukung penguatan nilai-nilai identitas kebangsaan.
- 3) Bagi pengembang kurikulum dan penulis buku teks, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus pemetaan materi pelajaran sejarah

Indonesia yang berkaitan dengan narasi sejarah Aceh, sehingga di masa mendatang mereka dapat lebih memahami peristiwa-peristiwa penting yang perlu dikonstruksi saat menyusun atau menulis buku teks pelajaran sejarah Indonesia.

- 4) Bagi peneliti sendiri, karya ini kedepannya bisa menjadi acuan dan langkah strategis dalam rangka pengembangan penulisan buku teks pembelajaran sejarah lokal Aceh yang nantinya bisa digunakan untuk mendampingi buku teks sejarah nasional mengingat hingga saat ini Provinsi Aceh belum dimiliki buku teks pembelajaran sejarah lokal yang didalamnya khusus membahas tentang peristiwa-peristiwa bersejarah di Aceh.
- 5) Karya penelitian ini dapat direkomendasikan sebagai rujukan kepada guru sejarah, khususnya guru-guru sejarah di Aceh tentang bagaimana sesungguhnya menggunakan buku teks pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selain berisi pengetahuan, di dalam narasi sejarah Aceh ternyata juga mengandung nilai-nilai ideologis seperti patriotisme, nasionalisme, integrasi bangsa, toleransi dan keterbukaan, kemanusiaan dan kepedulian sosial yang penting diajarkan dalam rangka penguatan nilai-nilai identitas kebangsaan.